

DAKWAH POLITIK KH ASEP SAIFUDDIN CHALIM

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Magister Dalam Program Studi
Komunikasi Penyiaran Islam**



**Oleh :
Moch. Nurcholis Majid
NIM: F02717226**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda-tangan di bawah ini saya:

Nama : Moch. Nurcholis Majid

Nim : F02717226

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 14 Juli 2019

Saya yang menyatakan

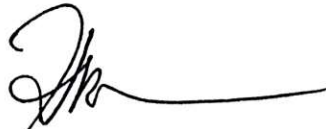
A 6000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp is yellow and green, featuring the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL', '6000', and 'ENAM RIBU RUPIAH'. The serial number 'E4D5CAFF946140560' is visible. A blue ink signature is written over the stamp.

Moch. Nurcholis Majid

PERSETUJUAN

Tesis berjudul "*DAKWAH POLITIK KH ASEP SAIFUDDIN CHALIM* " yang ditulis oleh Moch. Nurcholis Majid ini telah disetujui oleh oleh pembimbing pada tanggal 11 Juli 2019.

Oleh
Pembimbing



Dr. Moch. Choirul Arif, S.Ag, M.Fil.I
NIP. 197110171998031001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

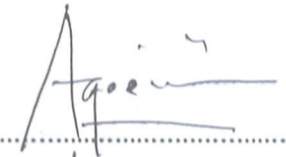
Tesis yang berjudul "*Dakwah Politik KH Asep Saifuddin Chalim*" yang ditulis oleh Moch. Nurcholis Majid ini telah di uji pada tanggal 30 Juli 2019.

Tim Penguji:

1. Dr. Moch. Choirul Arif, S. Ag, M.Fil. I
(Pembimbing/Ketua)



2. Dr. Agoes Moh. Moefad, SH. M.Si
(Penguji I)




3. Prof. Dr. H. Moh. Ali Aziz, M. Ag.
(Penguji II)



Surabaya, 7 Agustus 2019



Direktur,


Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag
NIP. 196004121994031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Moch. Nurcholis Majid
NIM : F02717226
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana / Komunikasi Pengajaran Islam
E-mail address : koliselmajid91@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

DAKWAH POLITIK KH. ASEP SAIFUDDIN CHALIM

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 08 Agustus 2019

Penulis


(Moch. Nurcholis Majid)
nama terang dan tanda tangan

	Studi Komunikasi Penyiaran Islam, 2018	subtansial, 2) Nilai kandungan “Jalan Sukses Al-Fatihah”, ilmu dan pengalaman Suyoto yang diajarkan kepada birokrat dilegitimasi bersama sebagai nilai objektif yang rasional dan bertujuan, 3) “Jalan Sukses Al-Fatihah” menjadi salah satu sistem refleksi diri yang diwujudkan dalam tindakan sehari-hari.	tokoh agama dalam kegiatan politik
2	Novi Wulandari dan Supriyanto <i>Impementasi Kurikulum Madrasah Bertaraf Internasional Amanatul Ummah Pondok Pesantren Nurul Ummah Pacet Mojokerto</i> Jurnal Manajemen Pendidikan. Vol. 1, No. 1, September 2004.	Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Kesimpulan dalam penelitian sebagai berikut: 1) penyusunan program pembelajaran dilakukan sebelum ajaran baru, terdapat rapat lingkup yayasan dan lingkup MBI, 2) pelaksanaan program pembelajaran menanamkan kurikulum Nasional, kurikulum Internasional, Kurikulum Al-Azhar, untuk memenuhi kebutuhan peserta didik alokasi Nasional (Formal), pada kurikulum Internasional terdapat TOEFL, 3) evaluasi program pembelajaran dilakukan dengan musyawarah dengan tim MGMP dan rapat rutin mingguan untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran	Persamaan penelitian ini sama meneliti lembaga yang di pimpin oleh KH Asep yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini, dan sama menggunakan metode studi kasus. Perbedaannya terletak pada aspek bahasanya dalam jurnal ini fokus pada dunia pendidikan dan penelitian ini fokus pada strategi dakwah politik yang dijalankan KH Asep Saifuddin Chalim.
3	Raden Panji Achamd Faqih Zamany	Metode penelitian ini metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus.	Persamaan dalam penelitian ini membahas terkait konsep dakwah politik, yang

	<p><i>Dakwah Politik Telaah Aktivitas Dakwah Politik Anggota DPRD Jawa Timur 2014-2019</i></p> <p>Surabaya, Tesis Program Komunikasi Penyiaran Islam, 2015</p>	<p>Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: Dakwah politik merupakan hal yang sangat strategis dalam memperdayakan umat dan sebagai sarana <i>amar ma'ruf nahi mungkar</i>. Dengan menggunakan tiga pilar utama metode dakwah <i>bil hikmah, bil mujadalah</i> sebagai metode utama dan dakwah <i>bil mau'idhoh hasanah</i> sebagai instrumennya, dan pesan dakwah disampaikan dengan bentuk kebijakan-kebijakan, peraturan daerah, dan berbagai macam program kegiatan pemberdayaan masyarakat</p>	<p>menjadi pembeda dengan penelitian ini yakni dalam tesis ini mengangkat politisi di DPRD yang berdakwah melalui pembuatan kebijakan sedangkan penelitian ini fokus untuk mengungkap proses dakwah tokoh agama dalam kegiatan politik</p>
4	<p>Noviati Yuniarsih</p> <p><i>Peran KH. Asep Saifuddin Chalim Dalam Mengembangkan Pondok Pesantren Amanatul Ummah Kembang Belor Pacet Mojokerto tahun 2001-2016</i></p> <p>Surabaya: Skripsi Program Sejarah Dan Perdaban Islam, 2017</p>	<p>Metode penelitian ini kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dan kesimpulannya sebagai berikut:</p> <p>1) KH Asep Saifuddin Chalim lahir di Leuwimuding Jawa Barat pada 16 juli 1955. Beliau menikah dengan Hj. Fadilah dan dikaruniai 9 putra putri, 2) awal terbentuknya pondok pesantren ini karena Kiai Asep ingin menyamai sistem pendidikan yang ada di sekolah non-muslim dan mewujudkan keinginan almarhum ayahandanya yang belum tercapai, 3) dalam mengembangkan Pondok Pesantren Amanatul Ummah Kembang Belor Pacet Mojokerto, Kiai Asep</p>	<p>Persamaannya sama mengungkap profil KH Asep Saifuddin Chalim dalam pengembangan pesantren.</p> <p>perbedaannya penelitian ini fokus pada aspek dakwah politik KH Asep Saifuddin Chalim</p>

Chalim. Adapun data pendukung kita dapat diambil dari hasil dokumentasi, observasi terkait konsep dan strategi dakwah politik.

- a) Data primer adalah data pokok dalam penelitian ini secara langsung diperoleh melalui lapangan. Sumber ini penulis ambil dari informan utama KH Asep Saifuddin Chalim untuk menggali data terkait konsep dan dakwah politik.
- b) Data sekunder adalah data penunjang. Data peneliti ini data-data yang menunjang data primer yang diperoleh melalui buku-buku bacaan dan dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan erat dengan persoalan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti mendapat data sekunder dari pemberitaan media, dokumentasi kegiatan KH Asep Saifuddin Chalim.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam setiap penelitian, data merupakan faktor penting yang akan menentukan pada bagaimana hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Untuk memperoleh hasil penelitian yang valid. Perlu menggunakan sumber-sumber yang sesuai dan dapat dipercaya kebenarannya serta menggunakan metode yang berkenaan dengan penelitian *field research* atau penelitian lapangan yakni penulis bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang dan interaksi sosial, individu, kelompok lembaga dan masyarakat dalam waktu yang terbatas dan untuk mendapatkan data primer dan sekunder dalam penelitian ini. Untuk melakukan *field research* atau

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas sistematika pembahasan dalam data penelitian ini peneliti membagi lima bab seperti berikut: 1) bab satu, pada bab ini penulis menjelaskan mengenai fenomena terkait dakwah politik yang dilaksanakan oleh KH Asep Saifuddin Chalim yang menjadi rumusan masalah, rumusan masalah yang menjadi pertanyaan besar dan menjadi fokus dalam konsep dan strategi dakwah yang dilakukan oleh KH Asep Saifuddin Chalim. Penulis menjelaskan mengenai metode penelitian untuk mengungkap perilaku konsep dan strategi dakwah yang dijalankan oleh KH Asep Saifuddin Chalim; 2) bab dua, pada bab ini penulis menjelaskan mengenai konsep dakwah politik serta teori Elit Politik sebagai analisis untuk menentukan posisi KH Asep Saifuddin Chalim dalam elit politik; 3) bab tiga, pada bab ini penulis menjelaskan penyajian data terkait rumusan masalah yang didapatkan dari hasil wawancara dengan informan. 4) bab empat, pada bab ini, penulis menjelaskan analisis terkait konsep dan strategi dakwah politik yang dijalankan oleh KH Asep Saifuddin Chalim menggunakan perspektif komunikasi politik dan teori Elit Politik sebagai analisis untuk menentukan posisi KH Asep Saifuddin Chalim dalam ranah politik; 5) bab lima, pada bab ini, penulis menarik poin-poin kesimpulan terkait konsep dan strategi dakwah politik KH Asep Saifuddin Chalim. Lebih lanjut penulis juga memberikan saran serta keterbatasan terkait penelitian ini.

Bambang Purwoko¹⁹ menuturkan bahwa setidaknya ada tiga periode panggung politik elit agama (kiai) dalam pertarungan politikan nasional. *Pertama*, tahun 1945 sampai 1965, dalam periode ini tokoh agama (kiai) yang menjadi politisi selanjutnya disebut dengan politisi Islam menjadi pelaku aktif atau subjek dari permintaan perpolitikan Indonesia. *Kedua*, dimana peran politisi Islam yang menjadi objek yang terikat oleh pemerintahan yang bersifat otoriter dalam orde baru yang memandang kekuatan Islam sebagai lawan besar negara dan para elit dengan berbagai cara sehingga mengurangi perlawanan terhadap dominasi negara. *Ketiga*, pada tahun 1998-2006 menjadi tahun kebebasan hak-hak politik warga negara untuk mengekspresikan politik termasuk para elit Islam.

Elit agama juga termasuk kiai. Ia memiliki hak dan kekuasaan serta kemampuan dalam mengajarkan keilmuan agama Islam kepada masyarakat. Elit agama merupakan seseorang pimpinan atau tokoh agama yang menjadi pemimpin kelompok keagamaan tertentu baik itu yang berbasis organisasi sosial pendidikan atau organisasi sosial kemasyarakatan, yang termasuk dalam ranah elit agama yakni para pemimpin organisasi keagamaan (misalnya organisasi yang terbesar di Indonesia adalah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, serta organisasi lainnya) maupun para tokoh agama (Kiai, Ustadz, Ustadzah) yang memiliki pondok pesantren atau memiliki pengikut

¹⁹ Bambang Purwoko, *Perilaku Politik Elit Agama Dalam Dinamika Politik Lokal*, Dalam *Focus Groups Discussion: Perilaku Elit Politik Dan Elit Agama Dalam Pilkada Di Kabupaten Kulonprogo*, diselenggarakan oleh LBDA Shalahudin JPPR dan The Asia Foundation, Yogyakarta, 3 agustus 2006, Hal. 2, dilihat juga pada Rudi Subiyakto, *Panggung Politik Kiai di Era Pemilukada*, *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 45, No. II, juli-desember 2011, hal. 1571

orang untuk mencapai tujuan bersama dan juga lembaga formal atau informal yang dimiliki tokoh agama (ketokohan). Ketika seorang tokoh agama memiliki lembaga yang sangat besar dan kuat akan mempermudah dakwah politiknya. Dikarenakan dengan memiliki lembaga yang besar dan kuat proses penyampaian dakwah politik yang dilakukan oleh tokoh agama mudah diterima masyarakat.

Publik sangat menghargai lembaga yang dapat menampung segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Sehingga persepsi publik terhadap citra lembaga, sangat ditentukan oleh kegunaan dari lembaga itu sendiri. Semakin tinggi manfaat yang dirasakan oleh publik terhadap lembaga tersebut. Sehingga masyarakat serasa ikut memiliki tersebut. Dengan artian bahwa ketika seorang tokoh dari lembaga tersebut membuat kebijakan atau arah dukungan kepada salah satu partai pastinya masyarakat yang mendapat manfaat dari lembaga tersebut akan langsung mengikuti apa yang disampaikan oleh tokoh tersebut.

Dalam memenuhi kepentingan masyarakat itu, lembaga secara perlahan-lahan membangun sebuah karakter kepribadian yang akan menjadi dasar lahirnya kredibilitas atau kepercayaan bagi masyarakat. Dilain sisi, karakter atau kepribadian suatu lembaga akan menjadi cara untuk menumbuhkan kredibilitas suatu lembaga itu. Demikian juga penampilan lembaga secara fisik, akan merupakan daya tarik tersendiri yang bersifat *nonverbal* dalam komunikasi politik.

masyarakat). Mereka yang tidak terpusat perhatiannya terhadap tuntutan yang mendesak dari para pengikut atau kelompoknya. Mereka lebih memilih untuk menetapkan terkait tujuan kebijakan yang lebih luas, mengusahakan reformasi, bahkan mendukung suatu perubahan yang revolusioner. Jika hal ini mendatangkan kebaikan lebih bagi bangsa dan negara. Politikus ideolog memiliki argumen dengan menawarkan suatu gagasan yang lebih baik dan menyakinkan orang terhadap suatu sudut pandang terkait menyatukan visi dan misinya.

- b) Politikus Wakil (Partisipan) yakni orang-orang yang berada dalam proses politik dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan pengikut atau kelompoknya. Dalam golongan ini lebih menekankan pada ketika ada keuntungan yang didapat kelompoknya ia akan memperjuangkan dengan sepenuhnya. Wakil sebagai makelar yang memiliki tujuan untuk membujuk orang lain agar mengikuti atau bahkan setuju dengan gagasan yang mereka tawarkan.

Dengan kata lain, yang dikatakan politikus utama orang-orang yang bertindak sebagai komunikator politik yang menentukan dalam pemerintahan mulai dari tingkat nasional maupun tingkat daerah. Seperti para pejabat eksekutif (presiden, menteri, gubernur, bupati, walikota, kecamatan, kelurahan); para pejabat legislatif (ketua MPR, Ketua atau anggotanya DPR/DPD/ DPRD1/DPRD2, Ketua Fraksi) dan otomatis

Selama menuntut ilmu agama di pondok Kiai Asep tetap mengambil pendidikan formal pada paginya di SMPN 1 Sidoarjo. Kemudian melanjutkan pendidikan formalnya di bangku sekolah SMA, namun hanya sampai kelas 2 SMA saja kerana ayahandanya wafat. Tetapi berkat kegigihan Kiai Asep dalam mencari ilmu ia tetap melanjutkan pendidikannya di Pondok Al-Khozini. Sampai beliau mendapat surat keterangan lulus dari kiai Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Kiai Asep untuk tetap melanjutkan pendidikannya yang lebih tinggi di kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya pada tahun 1975 untuk mengambil jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam pada Fakultas Adab.³

Belum lulus sarjana muda, beliau mendaftarkan kuliah untuk program D3 Bahasa Inggris di IKIP Surabaya (yang sekarang sudah berganti nama menjadi Universitas Negeri Surabaya) dengan mendaftarkan memakai ijazah persamaan SMA. Setelah menyelesaikan pendidikan D3 di IKIP Surabaya. Kiai Asep kemudian mengamalkan ilmunya menjadi salah satu guru di SMA Negeri 2 Lamongan selama 7 tahun dari rumah kontraannya di Siwalankerto, Surabaya.

Pada awal tahun 1974, Kiai Asep juga berkelana ke berbagai kota di Indonesia untuk mencari pengalaman hidup dan menimba ilmu. Di antara kota yang menjadi saksi atas perjalanan hidup yang keras pada waktu itu

³Dikutip dari laman Novirusgeta, <https://novirusgeta.wordpress.com/2017/10/27/dr-kh-asep-saifuddin-chalim-ma/> pada 17 Juni 2019 pukul 12:47 WIB

pendanaan pembuatan sebuah pesantren. Hal itu tidak mengurangi semangat Kiai Asep dalam membangun pesantren. Pendidikan saat itu masih sangat sederhana yakni mengaji di sebuah vila kecil yang dijadikan tempat belajar mengaji untuk masyarakat sekitar. Minat mengaji masih sangat minim hanya memiliki santri 24 santri yang mengikuti proses pembelajaran mengaji. Pengajaran kitab-kitab Islam yang menjadi satu-satunya bentuk pengajaran formal yang diajarkan di dalam pondok pesantren. Dengan tujuan pengajarannya sebagai cara untuk mendidik santri-santri yang tanggap dalam menjawab persoalan agama.

Pembelajaran huruf hijaiyah yang menjadi awal materi pembelajaran di pondok pesantren. Dengan berjalannya waktu materi pembelajaran juga mulai ada kemajuan yakni pembelajaran tentang cara membaca Al-Qur'an serta diajarkan syariat Islam serta cerita akhlak para Nabi dan orang-orang sholeh sehingga diharapkan para santri dapat meneladani akhlaknya. Sehingga menjadi bekal para santri dalam menjalankan kehidupan sehari-hari setelah selesai menuntut ilmu di pondok pesantren.

Berkat ketekunan dan keuletan Kiai Asep dalam mengelola Pondok Pesantren Amanatul Ummah sekarang memiliki beberapa lembaga yang dapat menampung berbagai santri dari dalam negeri hingga luar negeri untuk menimba ilmu di pondok. Lembaga Amanatul Ummah berdiri kokoh

seluas 5.000 M² bangunan ini mulai berdiri pada tanggal 01 Juni 2009. Berawal dari sebuah gagasan atau pemikiran yang sangat mendasar bersama dengan tokoh masyarakat dan pakar pendidikan bahwa seharusnya disekitar Pacet terdapat sekolah/madrasah formal tingkat SMA/MA dengan tujuan untuk menampung siswa Lulusan dari MTs/SMP agar bisa melanjutkan belajarnya ketingkatan yang lebih tinggi, tentunya dengan kualitas yang mumpuni namun tetap terjangkau oleh masyarakat setempat. Untuk itu MTs/MA Unggulan Hikmatul Amanah hingga saat ini tetap melayani masyarakat Pacet dan sekitarnya dengan program:

- 1) SPP dan uang gedung gratis
 - 2) Seragam sekolah gratis
 - 3) Mobil antar jemput gratis
 - 4) Makan siang gratis
 - 5) Tryout dan bimbingan UN gratis
- h. Institut KH. Abdul Chalim (IKHAC)

Institut KH. Abdul Chalim merupakan cikal bakal dari universitas yang terlahir dari cita-cita luhur untuk mewujudkan perguruan tinggi yang berskala internasional sejajar dengan kampus Al-Azhar di Mesir, Harvad di Amerika, Sorbonne di Prancis dan Universitas KH. Abdul Chalim di Indonesia.

Institut KH Abdul Chalim dibina oleh dosen-dosen yang memiliki kualitas dan sistem yang kompetitif untuk menjadikan para lulusan

sebagai interpreneur yang dapat membuka lapangan lapangan kerja, dan dicari oleh pekerjaan bukan mencari kerja, karena kualitas akademis dan keterampilan dimilikinya. Selain kompetensinya, semua prodi diproses secara intensif menguasai akutansi, IT, Bahasa Arab dan Bahasa Inggris, IP untuk semua mata kuliah diupayakan minimal B+ dengan pemrosesan yang rasional dan humanis. Kualiatas dari alumni IKHAC dapat dipertanggungjawabkan dengan ujian semesternya berupa: pekan penyempurnaan, *Short Course 1*, UAS, *Short Course 2*, dan *Remedial Test*.

Saat ini IKHAC memiliki 3 fakultas, yakni Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syari'ah dan Fakultas Dakwah dengan 10 jurusan atau program studi yakni: Manajemen Pendidikan Islam (MPI), Pendidikan Bahasan Arab (PBA), Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Guru Raudlatul Athfal (PGRA), Hukum Keluarga Islam/Ahwalus Syahsyiyah (AS), Ekonomi Syariah (ES), Perbankan Syariah (PS), Komunikasi Penyiaran Islam (KPI), dan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT). Dan program megister S2 ada 2 program studi yakni Pendidikan Agama Islam (PAI), dan Manajemen Pendidikan Islam (MPI).

Berkat keuletan dan ketangguhan Kiai Asep dalam mengelola Yayasan Pondok Pesantren Amanatul Ummah. Kiai Asep mendapat beberapa prestasi yang membanggakan dari berbagai instansi yang terkemuka. Beberapa awards yang diterima oleh Yayasan Amanatul Ummah yakni pada tahun

siapa saja yang mau membacanya agar memahai secara lebih dan tidak ragu lagi dalam melakukan amaliahnya yang telah berkembang dari abad-ke-abad. Tuduhan kelompok yang melakukan serangan itu sesungguhnya tidak berdasar dan tidak terbukti kebenarannya. Mereka salah dalam melihat dan menilai masyarakat NU dalam beramailah dari dulu hingga saat ini. dengan adanya buku ini agar masyarakat tidak mudah menyalahkan kelompok lain.

Buku yang selanjutnya diberi judul "*Aswaja di Tengah Aliran-aliran*". Buku ini juga diterbitkan dan dijadikan pengangan bagi guru NU dan dijadikan sumber referensi bagi disiplin keilmuan Islam, seperti Hadist, Ushul Fiqh, Ilmu Balaghah, dan lain sebagainya. Adapun buku karangan Kiai Asep selanjutnya yang diperuntukkan bagi para santinya. Yakni buku yang berjudul "*Petunjuk Keberhasilan*". Buku ini digunakan untuk istighosah di pagi hari pada setiap apel pagi, untuk mengawali kegiatan belajar di Madrasah atau sekolah dibawah naungan Lembaga Pendidikan Unggulan Amanatul Ummah.

4. Kiprah politik KH Asep Saifuddin Chalim

Dalam ranah kegiatan politik KH Asep Saifuddin Chalim bukan lagi sebagai politisi, namun posisinya sebagai tokoh agama yang tidak lepas dari aktivitas politik. Dikarenakan sebelum menetapkan dirinya sebagai tenaga pendidik. Ia pernah mengikuti kontestasi pemilihan legislatif melalui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Kiai Asep pada waktu itu berhasil mengalahkan politisi yang lainnya yang ikut bertarung merebutkan kursi DPRD kota Surabaya. Dengan kerja kerasnya ia memperoleh suara yang cukup banyak

dari dapilnya, sehingga dapat mengantarkan Kiai Asep untuk menduduki kursi parlemen sebagai anggota dewan DPRD Kota Surabaya dari fraksi PKB. Kiai Asep dalam menduduki kursi DPRD kota Surabaya tidak begitu lama hanya dalam 4 bulan ia melepaskan jabatannya dengan begitu saja. dikarenakan beliau merasa bahwa dirinya tidak pantas sebagai dewan. Namun, ia lebih cocok sebagai seorang guru.¹²

Peran Kiai Asep dalam ranah politik sangat jelas ditunjukkan dengan bertindak sebagai juru bicara tim 17 untuk pemenangan pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak yang maju dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018. Tidak hanya disitu saja, Kiai Asep juga menggerakkan jaringan kiai dan satri dalam menggalang dukungan dalam kontestasi Pilgub Jawa Timur 2018. Dalam mendukung Khofifah untuk memenangkan pemilu gubernur Jawa Timur 2018. Ia tidak hanya memberikan melalui deklarasi saja. Namun lebih dari itu Kiai Asep juga menjadi tim sukses hingga juru bicara dalam memenangkan Khofifah-Dardak. Salah satu bentuk dukungan disasari oleh Khofifah, memiliki pengalaman yang bagus dan Khofifah juga merupakan salah satu wali santri Amanatul Ummah. Dengan hal itu berharap aspirasi untuk mensejahterakan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi bisa terwujud ketika Khofifah memenangkan kontestasi Pilgub 2018.

¹² Djoko Pitono, “*Membangun Pondok Megah, Menyebarkan Ratusan Beasiswa*”, dilihat dalam laman Times Indonesia, <https://m.timesIndonesia.co.id/read/142982/20170223/020552/membangun-pondok-megah-menyebarkan-ratusan-beasiswa/> pada 17 Juni 2019 pukul 13:00 wib

terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).

Oleh karena itu, bentuk keterlibatan kiai dalam segala bentuk kegiatan dakwah politik disandarkan oleh ayat tersebut. Bambang Purwoko⁶ menuturkan bahwa setidaknya ada tiga periode pangung politik elit agama (kiai) dalam pertarungan politikan nasional. *Pertama*, tahun 1945 sampai 1965, dalam periode ini tokoh agama (kiai) yang menjadi politisi selanjutnya disebut dengan politisi Islam menjadi pelaku aktif atau subjek dari permintaan perpolitikan Indonesia. *Kedua*, dimana peran politisi Islam yang menjadi objek yang terikat oleh pemerintahan yang bersifat otoriter dalam orde baru yang memandang kekuatan Islam sebagai lawan besar negara dan mengoptimalkan para elit dengan berbagai cara sehingga mengurangi perlawanan terhadap dominasi negara. *Ketiga*, pada tahun 1998-2006 menjadi tahun kebebasan hak-hak politik warga negara untuk mengekspresikan politik termasuk para elit Islam.

Pemahaman Kiai Asep terhadap hal keikutsertaan kiai dalam ranah dakwah politik itu suatu hal yang terpenting seseorang da'i atau kiai yang ingin terjun dalam ranah politik itu harus memahami ideologi partai yang menjadi alat politik untuk memperjuangkan kemaslahatan umat. Sehingga ketika kiai sudah masuk dalam ranah politik tidak lagi menjadi kader partai namun lebih kepada memberikan pengaruh terhadap arah partai sehingga dapat mengubah tatanan

⁶ Bambang Purwoko, *Perilaku Politik Elit Agama Dalam Dinamika Politik Lokal*, Dalam *Focus Groups Discussion: Perilaku Elit Politik Dan Elit Agama Dalam Pilkada Di Kabupaten Kulonprogo*, diselenggarakan oleh LBDA Shalahudin JPPR dan The Asia Foundation, Yogyakarta, 3 agustus 2006, Hal. 2, dilihat juga pada Rudi Subiyakto, *Panggung Politik Kiai di Era Pemilukada*, *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 45, No. II, juli-desember 2011, hal. 1571

Dalam dakwah politik lebih fokus pada aspek pemahaman terkait ajakan kebaikan dalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan, sehingga menghasilkan suatu kebijakan yang lebih mendekati kepada rakyat. Menyerukan kebaikan dalam ranah politik itu butuh proses panjang sehingga menghasilkan suatu kebijakan.

Untuk memahami konsep dakwah politik Kiai Asep kita perlu mengkaji terkait keterikatan ajakan kebaikan yang memiliki orientasi tujuannya kepada suatu kemaslahatan rakyat. Sehingga perlu diketahui kemaslahatan rakyat yang dimaksud dalam konsep dakwah politik yakni upaya-upaya yang dapat dilaksanakan dengan tujuan mempermudah segala urusan masyarakat. Sehingga orientasi politik kiai pada sejatinya *amar ma'ruf nahi munkar*, hal tersebut dikemas dalam kepentingan kekuasaan.

Sehingga dengan konsep dakwah yang paparkan oleh Kiai Asep tersebut diorientasikan kepada kemaslahatan bangsa. Dalam konteks peran kiai dalam ranah politik untuk menegakkan kemaslahatan rakyat lebih menekankan pada beberapa aspek: *Pertama*, menjalankan amanat, dalam pemahaman Kiai Asep dalam lebih menekankan pada aspek bahwa sorang yang sudah diberi mandat yang diemban oleh aparatur pemerintah itu bersumber dari rakyat yang merupakan konsekuensi dari prinsip kedaulatan rakyat. Sehingga diperlukan menjaga amanat dengan sebaiknya sehingga memberikan suatu kebijakan yang lebih pro pada rakyat. *Kedua*, upaya untuk menyederakan ekonomi masyarakat sehingga dengan konsep tersebut dapat mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi rakyat. *Ketiga*, keadilan dalam membentuk kebijakan.

Dalam memahami konsep dakwah politik dalam kajian komunikasi politik adalah bagaimana seseorang da'i atau kiai tersebut dapat mempengaruhi masyarakat untuk dapat menggugah sikap dan perilakunya agar dapat berkehidupan yang Islami.⁷ Diluar itu, sebenarnya dalam komunikasi dakwah politik juga dapat berarti setiap individu harus menghiasi komponen-komponen dan media komunikasi agar dapat memaksimalkan proses komunikasi politik dengan baik. Selain itu para tokoh agama atau kiai dapat memanfaatkan elemen kekuasaan⁸ agar dapat lebih mudah mengkomunikasikan aspek ide dakwah politik.

Dalam komunikasi politik perlu adanya proses mengkomunikasikan suatu ide atau tataran pemahaman terhadap khalayak politik. Aristoteles, dalam teorinya tentang Retorika Politik, menjelaskan bahwa ada tiga komponen dasar dalam komunikasi politik yakni *pertama, communicative ideology* atau penyampaian nilai-nilai atau ideologi yang disampaikan oleh komunikator politik. *Kedua, emotional quality*, perasaan emosional yang dimiliki oleh khalayak pada saat terjadinya proses komunikasi. *Ketiga, core argument* atau argumentasi yang mendukung.⁹ Bahwa pesan komunikasi yang memiliki *power* atau kekuatan dalam menyampaikan keinginan, nilai, ideologi, pemikiran, opini,

⁷ Suharto, *Urgensi Komunikasi Politik Dakwah*, Jurnal Dakwah Tabligh, Vol.14, No, 1, Juni 2013, hal 31

⁸ Kekuasaan dimaksud adalah bahwa seorang da'i harus mampu berinteraksi dengan seluruh stakeholders masyarakat, terlebih pada elemen pemerintahan untuk bersinergi dan membangun kedekatankedekatan personal dan komunal dengan tokoh-tokoh politik berikut lembaga-lembaga politik sehingga dapat dengan mudah untuk menguasai fasilitas-fasilitas public.

⁹ Henry Subiakto Dan Rachma Ida, *Komunikasi Polirik, Media Dan Demokrasi*, (Jakarta: KENCANA, 2015) Hal, 46

dan sebagainya dari peserta komunikasi, persuasif untuk mempengaruhi orang lain agar berperilaku sesuai dengan apa yang diinginkan oleh komunikator.

Dari kerangka tersebut bahwa yang dilakukan Kiai Asep dalam mengkomunikasikan ide atau pemahaman terkait dakwah politik terhadap khalayak politik. Pertama *communicative ideology* atau penyampaian nilai-nilai. Dalam hal ini Kiai Asep lebih menekankan pada aspek kemaslahatan rakyat dengan menjalankan amanat supaya tidak melakukan korupsi dan menghasilkan kebijakan yang diorientasikan kepada keadilan masyarakat. Disisi lain juga menekankan pada penyampaian nilai-nilai yang menfokuskan pada mencintai Islam dan melindungi NKRI. Sesuai pemahaman peneliti bahwa Kiai Asep tidak menyampaikan secara jelas konsep dakwah politik yang diinginkan kepada khalayak politik. Dalam penyampaian pesan terkait ide dakwah politik lebih dilakukan secara persuasif sebagai alat untuk menjangkau bagian kelompok yang terstruktur oleh sistem politik yang ada. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Dan Nimmo mengatakan bahwa strategi persuasif merupakan alat yang dapat digunakan oleh kelompok yang tersuktur, untuk menjangkau masyarakat yang secara psikologis dimanipulasi dan dihubungkan ke dalam kelompoknya.¹⁰ Namun, ia lebih menekankan pada aspek pemahaman terkait tindakan untuk menjaga amanat rakyat.

Kedua, *core argument* atau argumentasi yang mendukung. Dalam hal ini yang dilakukan kiai yakni menyampaikan argumentasi terhadap konsep kemaslahatan rakyat dengan memberikan contoh-contoh yang relevan. Namun,

¹⁰ Dan Nimmo, *Political Communication And Public Opinion In America, Atau Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan Dan Media*, Cetakan Kedua, Terjemahan Tjun Surjaman, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007). Hal. 12

1) Strategi Mediasi Politik

Strategi mediasi politik ini yang dilakukan oleh Kiai Asep dalam menyampaikan pesan dakwah politik melalui jalur parlemen, sehingga muncullah strategi mediasi politik yang dimaksud dalam hal ini yakni memberikan bantuan terhadap masyarakat dalam menyelesaikan problem atau sengketa dengan birokrasi pemerintahan namun tetap memposisikan dirinya sebagai pembela rakyat.

2) Strategi Jejaring Politik

Dalam menjalankan strategi jejaring politik Kiai Asep lebih menekankan pada aspek pendekatan struktural dan kultural mengakomodasi jejaring politiknya. Sehingga dengan memanfaatkan pendekatan secara struktural yang dimilikinya melalui anggota Pergunu yang sudah tersebar di 34 Provinsi. Hal tersebut lebih memudahkan berkembangnya jaringan politik yang dibangun oleh Kiai Asep. Selain itu pendekatan secara kultural juga dilakukan dengan mendekati masyarakat sekitar pondok pesantren, wali santri dan koleganya dalam meraih dukungan jaringan politik. Sehingga jejaring politik yang di bangun oleh Kiai Asep lebih kokoh secara struktural dan kultural.

Dalam membangun strategi jejaring politik Kiai Asep menamakan jaringannya sebagai Jaringan Kiai Santri Nasional yang disingkat JKSN. Dalam struktur jejaring JKSN posisi Kiai Asep sebagai Dewan Penasehat. Dalam jaringan politik ini lebih

menakankan pada aspek kerjasama dalam mendukung pasangan calon untuk memperjuangkan kemaslahatan bangsa. Hal tersebut sesuai dengan teori jaringan yang dikemukakan oleh Fukuyama yang mengatakan bahwa jaringan merupakan hubungan kerja satu orang dengan yang lain yang diikat dengan nilai kepercayaan.¹² Jaringan ini memungkinkan orang-orang mencapai tujuan kelompok jaringan dan mengikat masyarakat secara bersama-sama. Bahwa JKSN dapat dikategorikan sebagai sebuah jaringan sosial yang memiliki hubungan antar sesama anggotanya, bersifat saling mengikat dengan nilai-nilai Islam sebagai bagian dari sistem kepercayaan, dan memiliki tujuan bersama dalam berbagai agenda politik praktis, sehingga JKSN dapat disebut sebagai kelompok jaringan sosial dengan ciri khas basis sosial kiai dan santri secara struktural maupun kultural yang bersumber dari institusi kegaman masyarakat.

Jaringan JKSN dapat dianggap sebagai jaringan sosial politik dari pada jaringan pesantren. Dikarenakan JKSN ini merupakan jaringan yang diorientasikan untuk menampung aspirasi politik kiai dan santri dalam pemilihan umum. Hal tersebut orang-orang menduduki jabatan dalam pengurusan di JKSN adalah kiai dan santri dari berbagai pesantren yang memiliki pemahaman dakwah politik yang sama.

¹² Sansan Hasanudin, *Mekanisme Religio-Politik Pesantren: Mobilisasi Jaringan Hamida Dalam Politik Elektoral Tasikmalaya*, Masyarakat Jurnal Sosiologi, Vol. 22, No. 1, Januari 2017, Hal 80

yang ada. Sehingga perlu ada pembenahan yang konsisten dalam pola kaderisasi sehingga bisa memberikan pengaruh terhadap sistem politik saat ini. Dalam penerapannya melalui pendekatan kultural yang dimana Kiai Asep mengetahui kemampuan calon yang ingin ia dukung untuk maju dalam pemilihan umum. Menurut Amalia pendekatan kultural adalah salah satu strategi yang sering digunakan untuk mengatasi masalah dan lebih bersifat adaptif dan merupakan bagian dari pendekatan struktural fungsioanal.¹⁴

Peneliti melihat dari analisa terkiat strategi yang dijalankan oleh Kiai Asep dalam menyampaikan dakwah politik. Strategi yang lebih dijalankan dan dapat menunjang strategi dakwah politik untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat yakni pada aspek pendekatan kultural. Peneliti beranggapan bahwa figur Kiai Asep di masyarakat memiliki peran penting sehingga strategi yang dijalankan dalam dakwah politik terpusat pada pendekatan secara kultural. Namun, disebagaian strateginya lebih menekankan pada dua pendekatan yakni kultural dan struktural. Dari kedua hal strategi yang dilakukan oleh Kiai Asep, peneliti menyebutkan bahwa strategi kaderisasi yang dijalankan tidak berupa kaderisasi seperti dalam yang ada dalam partai politik. Namun menekankan pada tokoh yang memiliki integritas yang tinggi dalam memperjuangkan hak rakyat dan diberikan pesan-pesan dakwah politik yakni mencintai Islam dan melindungi NKRI. Hal tersebut peneliti memiliki pandangan termasuk dalam proses kaderisasi dalam pendekatan kultural.

¹⁴ Amalia Meika, *Pendekatan Kultural Sebagai Strategi Resolusi Konflik: Kasus Khon Kaen Thailand*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 10, No. 2, September 2006, hal 182

untuk berbagai tujuan tetapi biasanya berkaitan dengan sekedar menginginkan perubahan sosial. Namun ketika ditarik dalam ranah. Sedangkan elit lokal yang dimaksudkan Mosca meliputi elit politik, elit agama, dan elit masyarakat.

Pandangan Mosca dalam memahami elit lokal kemudian ditarik dalam penelitian ini untuk mengungkapkan posisi Kiai Asep dalam ranah politik termasuk dalam Elit agama. Elit agama di daerah sangat berperan dalam aktivitas politik lokal. Para elit agama mempunyai modal sosial dan simbolik berupa jamaah, pengetahuan agama dan kharisma, yang membuat dirinya dipatuhi oleh segenap masyarakat daerah. Seringkali dalam setiap pemilihan umum, elit agama dijadikan rujukan untuk silaturahmi politik kepondok-pondok pesantren atau sowan kerumah kiai untuk meminta doa atau restu. Silaturahmi politik yang dilakukan oleh kandidat itu dapat mengidentifikasi bahwa pengaruh tokoh agama terhadap masyarakat sangat besar.

Begitu pula halnya yang terjadi di daerah Jawa Timur, banyak sekali tokoh politik yang mealukan silaturhami kepada tokoh agama salah satunya dengan Kiai Asep Saifuddin Chalim yang memiliki pengikut cukup banyak di wilayah Surabaya, Sidoarjo dan Mojokerto. Sehingga peneliti mengidentifikasi posisi Kiai Asep sebagai elit agama dalam konteks elit politik menurut Mosca. Dikarenakan banyak tokoh politik yang melakukan safari politik kepada beliau. Salah satunya Khofifah dan Emil pada saat ingin melakukan kontestasi pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018.

Terjunnya elit agama ke kancah perpolitikan menjadikan agama bercampur-baur dengan kepentingan dan aktivitas politik. Dari sanalah lahir

